

FUNGSI PEMERINTAHAN KAB. BADUNG DALAM MEMBANTU MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Made Surya Wirawan¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia

Email : suryawirawann7@gmail.com

Abstract

Badung Regency is known to have beautiful tourist objects and is very attractive to tourists to visit. These places or attractions are in the form of natural tourism, artificial tourism, cultural tourism and youth tourism. Development development in the tourism sector is not only useful for increasing income, one of the development efforts and equitable development is to increase the participation of the business community to invest in Badung Regency. Investment or investment in Badung Regency will be carried out properly and directed if careful, holistic planning is carried out, and there is information on investment opportunities. Based on the results of research conducted in Badung Regency regarding the functions of the Regency government. Badung in helping to build the community's economy. Therefore, the authors can conclude from the results of the study as follows. The government has 5 functions, namely the function of the government as a regulator, dynamist, facilitator, innovator, and catalyst.

Keywords: *Building the Community Economy, District Government Functions. Badung.*

Abstrak

Kabupaten Badung dikenal memiliki objek wisata yang indah dan sangat diminati wisatawan untuk dikunjungi. Tempat atau objek wisata tersebut berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata remaja. Pengembangan pembangunan pada sektor pariwisata disamping bermanfaat untuk peningkatan pendapatan, salah satu upaya pengembangan dan pemerataan pembangunan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Badung. Penanaman modal atau investasi di Kabupaten Badung akan dapat terlaksana dengan baik dan terarah apabila dilakukan perencanaan yang matang, holistic, dan adanya informasi peluang investasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Badung mengenai fungsi pemerintahan Kab. Badung dalam membantu membangun perekonomian masyarakat. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut. Pemerintah memiliki 5 fungsi yaitu Fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, Inovator, dan Katalisator.

Kata Kunci: Membangun Perekonomian Masyarakat, Fungsi Pemerintahan Kab. Badung.

PENDAHULUAN

Kabupaten Badung adalah salah satu dari Sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, merupakan Kabupaten paling selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, dan secara fisik mempunyai bentuk unik menyerupai keris. Keunikan ini kemudian diangkat menjadi lambing daerah yang merupakan symbol semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan historis wilayah ini, yaitu "Puputan Badung". Semangat ini pula yang kemudian melandasi motto kewajiban pemerintah Badung yaitu "Cura Dharma Raksaka" yang artinya kewajiban pemerintah adalah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya.

Kabupaten Badung dikenal memiliki objek wisata yang indah dan sangat diminati wisatawan untuk dikunjungi. Tempat atau objek wisata tersebut berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata remaja. Dengan memiliki banyak obyek wisata yang sangat indah dan dengan posisi yang sangat strategis sebagai pintu masuk utama internasional dan domestic melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan ditunjang oleh ketersediaan fasilitas akomodasi pariwisata, tidak bisa dipungkiri bahwa

pembangunan di Kabupaten Badung dominan pada sektor pariwisata. Sehingga sebagian besar pendapatan Kabupaten Badung bersumber dari sector pariwisata.

Pengembangan pembangunan pada sektor pariwisata disamping bermanfaat untuk peningkatan pendapatan, salah satu upaya pengembangan dan pemerataan pembangunan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Badung. Penanaman modal atau investasi di Kabupaten Badung akan dapat terlaksana dengan baik dan terarah apabila dilakukan perencanaan yang matang, holistic, dan adanya informasi peluang investasi.

Di pusat Pemerintahan Kabupaten Badung banyak terdapat dinas-dinas pemerintahan, salah satunya adalah Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Badung. Dibagian ini terdapat tiga sub bagian yaitu, Sub Bagian Pengendalian Distribusi Perekonomian, Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Sub Bagian Koordinasi, Sinkronasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini adalah dengan metode gabungan pendekatan observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran lokasi kegiatan. Gambaran secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan. Kegiatan praktik kerja lapangan ini dimulai dari tanggal 04 Juli sampai dengan tanggal 02 September 2022 yang berlokasi di Pemerintahan Kabupaten Badung.

Kegiatan magang dilaksanakan melalui berapa tahapan. Pertama, tahapan persiapan berupa survei ke lokasi sebagai bentuk persiapan awal sebelum pelaksanaan magang, survei dilakukan sekaligus menyerahkan dokumen-dokumen persiapan kegiatan magang dan menyampaikan kepada pihak mitra tentang maksud dan tujuan diadakannya kegiatan magang ini. Kedua, melakukan koordinasi dengan pihak kampus atau dosen pembimbing dengan menyampaikan bagaimana alur kerja maupun kendala yang dihadapi selama proses pkl dalam bentuk sebuah laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setidaknya penulis memaparkan beberapa peran pemerintah yang dianggap sangat berpengaruh dalam meningkatkan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pembuat perahu pinisi yaitu sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, inovator, dan katalisator. Kesemua peran tersebut harus dapat dijalankan secara optimal agar mampu menciptakan pola hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam turut menyukseskan program-program pembangunan khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Badung.

1. Fungsi Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yang dimaksud dalam penulisan ini adalah setiap usaha dan upaya pemerintah Kabupaten Badung dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pembuatan regulasi tersebut, diharapkan agar setiap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bandung akan mampu meningkatkan status ekonomi terhadap masyarakat.

Adapun fungsi pemerintah sebagai regulator dalam rangka dalam membantu membangun perekonomian masyarakat dapat dibagi ke dalam dua hal penting yaitu; (a) bagaimana pemerintah membuat regulasi tentang percepatan pembangunan melalui program-program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; dan (b) membuat kebijakan- kebijakan usaha bagi para pengusaha lokal agar mampu mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat kecil (khususnya para pekerja pembuat perahu pinisi) tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

a. Program pemberdayaan masyarakat

Salah satu cara atau strategi yang dianggap oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) cukup berpengaruh dalam membantu membangun perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan atau kelurahan adalah dengan melakukan dan merealisasikan berbagai bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat bantuan sosial kepada masyarakat kabupaten badung sebagai penunjang ekonomi mereka. Selain itu program tersebut sampai saat ini hanya dilakukan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan dalam pemberian daya kepada masyarakat dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada masyarakat kabupaten badung untuk dapat menciptakan ekonomi kreatif dan usaha-usaha mandiri lainnya. Hal ini dilakukan arena kegiatan penyuluhan dan pelatihan tersebut dianggap sebagai program yang tepat untuk direalisasikan saat ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung.

b. Kebijakan usaha

Kebijakan usaha yang dimaksud disini adalah adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung yang lebih berpihak kepada para pengusaha lokal sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan ekonomi mereka termasuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pengusaha lokal untuk berkembang sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Disamping itu dengan adanya kebijakan atau program yang lebih berorientasi kepada pengembangan usaha akan memberikan asumsi yang positif bagi pemerintah termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk turut serta memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap berbagai program-program pemerintah itu sendiri.

2. Fungsi Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai penggerak bagi masyarakat dimana pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya bagi para pengusaha dan pekerja yang berada di Kabupaten Badung. Adapun peran pemerintah daerah Kabupaten Badung dapat berbentuk program penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebagai pendorong dalam memajukan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya tentu akan berdampak pada pembangunan ekonomi bagi masyarakat.

a. Kegiatan penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dimaksud disini adalah suatu proses kegiatan atau cara yang dijalankan oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten badung baik pemerintah

kelurahan, pemerintah kecamatan atau organisasi dinas pemerintah yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam memberikan keterangan dan informasi yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi masyarakat sehingga dapat membentuk opini mereka tentang perlunya peningkatan kualitas hidup melalui kemandirian ekonomi. Selain itu, penyuluhan ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menuangkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi termasuk usulan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka kepada pemerintah daerah Kabupaten Badung.

b. Pelatihan

Pelatihan yang dimaksud disini adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman masyarakat sehingga dapat memberikan bekal bagi mereka untuk menciptakan usaha-usaha kreatif seperti pelatihan keterampilan, pembuatan souvenir dan lain-lain sebagainya yang dapat bernilai jual tinggi sehingga mampu menambah penghasilan masyarakat.

3. Fungsi Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah Kabupaten badung melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. Dari segi pendampingan pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, pemerintah Kabupaten badung selain sebagai penggerak di bidang tersebut harus juga mampu mendampingi masyarakat agar program-program tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sedangkan dalam hal pendanaan atau permodalan, pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha kepada para pengusaha lokal yang ingin bergerak dalam bidang kewirausahaan dengan harapan mewujudkan ekonomi kreatif yang mandiri dan memajukan sektor-sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan kuliner. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Badung yang menginginkan adanya pembangunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan menciptakan pemerataan pembangunan di tiap-tiap wilayah.

a. Kegiatan pendampingan usaha

Kegiatan pendampingan usaha dimaksudkan agar kegiatan atau program-program pemberdayaan masyarakat senantiasa searah dengan tujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Badung. Akan memudahkan bagi pihak pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi yang efektif serta memberikan inovasi kepada masyarakat yang didampingi. Di satu sisi, masyarakat akan termotivasi dalam meningkatkan usaha-usaha mandiri karena merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

b. Pemberian bantuan modal usaha

Pemberian bantuan modal usaha kepada para kelompok usaha yang berada di Kabupaten Badung dimaksudkan untuk mendorong percepatan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga secara bertahap akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberian bantuan modal usaha ini dapat dalam bentuk uang tunai sebagai modal awal dalam merintis usaha dan keperluan-keperluan usaha yang dibutuhkan oleh pada kelompok usaha. Dalam pemberian bantuan modal usaha ini, pemerintah Kabupaten Badung tidak dapat bertindak diskriminatif akan tetapi harus lebih bersifat obyektif dan bertindak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya bagi para pengusaha lokal.

4. Fungsi Pemerintah Sebagai Inovator

Pemerintah sebagai inovator diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menterjemahkan berbagai macam program dengan bahasan yang sederhana sehingga dapat mengunggah partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung harus mampu tampil sebagai pihak yang memberikan masukan atau pandangan yang lebih kreatif untuk mendorong perekonomian masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, mampu menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat dan sebagai agen yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah dan keluhan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan metode - metode pendekatan yang lebih efektif dan variatif (tidak monoton) berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sekaligus memudahkan masyarakat untuk memahami maksud dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Sebagai katalisator dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Badung harus mampu berperan sebagai agen dalam percepatan pengembangan potensi daerah yang akan menjadi modal sosial untuk menarik partisipasi masyarakat. Dengan adanya peran pemerintah sebagai katalisator bukan suatu hal yang mustahil apabila kesenjangan pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah yang terdapat di Kabupaten Badung akan dapat diminimalisir dan diseimbangkan. Adanya kesenjangan sosial, wilayah tertinggal dan minimnya kualitas sumber daya manusia salah satunya dikarenakan karena pembangunan masing-masing daerah/wilayah tidak seimbang dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah daerah Kabupaten Badung sebagai katalisator dalam percepatan pengembangan berbagai potensi daerah harus sedapat mungkin dijalankan dengan efektif dan akuntabel sehingga akan mendorong kepercayaan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam program pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Badung mengenai fungsi pemerintahan Kab. Badung dalam membantu membangun perekonomian masyarakat. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut. Pemerintah memiliki 5 fungsi yaitu Fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, Inovator, dan Katalisator.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan melihat permasalahan yang terjadi secara obyektif di lapangan, maka dari itu peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Badung

Diharapkan untuk senantiasa berperan aktif dalam program-program peningkatan perekonomian masyarakat baik sebagai agen pendamping bagi masyarakat maupun sebagai penterjemah setiap program-program pemerintah maupun sebagai mediator antara pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat Kabupaten Badung dalam memberikan usulan dan masukan tentang apa yang dibutuhkan oleh mereka agar dapat berkembang dan mampu untuk mandiri, serta segera mampu merealisasikan kebijakan untuk perekonomian masyarakat dalam bentuk peraturan daerah.

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Badung

Senantiasa mendukung dan ikut menyukseskan program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Badung termasuk program - program pemberdayaan masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan, aksesibilitas jalan dan pariwisata agar mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang berada di Provinsi Bali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan magang ini dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh tim pelaksana, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung beserta jajaran dan staff yang telah bersedia dan menerima kehadiran saya dengan baik selama proses magang, serta terimakasih kepada tim LP2M Universitas Pendidikan Nasional atas kerjasama dan dukungannya sehingga kegiatan magang dapat berjalan dengan tertib dan lancar.